

KRONOLOGIS PENANGKAPAN & PELEPASAN MASYARAKAT KELOMPOK TANI SALOLOANG PEMILIK LAHAN PEMBANGUNAN BANDARA VVIP IKN

1. PROTES KELOMPOK TANI SALOLOANG ATAS ADANYA NAMA FIKTIF

Bahwa semua diawali oleh dugaan adanya Mafia Tanah yang bermain-main di lahan Masyarakat yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai titik utama Pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara. **Protes keras Masyarakat ini karena nama-nama mereka ditiadakan dalam Peta Bidang dan memasukkan alias menampilkan nama-nama asing alias tidak diketahui alias fiktif dalam Peta Bidang obyek pembebasan lahan** padahal Kelompok Tani Saloloang adalah Pemilik lahan yang berdasarkan DOKUMEN SAH yang telah dikuasai dan digarap puluhan tahun dan secara turun temurun dari orang tua mereka dan tentunya berpenghidupan sebagai Petani dilahan tersebut, termasuk memiliki dan merawat tanam tumbuh mereka.

2. KESALAHAN DALAM PENERAPAN LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA

Selain nama-nama fiktif, PJ Bupati juga selalu berpegang teguh dengan pendapatnya bahwa payung hukum penerapan penyelesaian masalah Kelompok Tani Saloloang ini berdasarkan UU Reforma Agraria melalui **PerPres No 62 Tahun 2018 dan PerPres No. 78 Tahun 2023** yang kewenangannya ada di Bank Tanah karena dianggap Tanah Terlantar ex. HGU PT. TKA padahal lahan tersebut **bukan tanah terlantar dan sudah puluhan tahun secara turun temurun dikelola oleh Masyarakat Kelompok Tani Saloloang** sehingga pendekatan payung hukum seharusnya melalui UU Reforma Agraria yang tertuang dalam **PerPres No. 86 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.**

3. SURAT KEBERATAN YANG DI KIRIMKAN KEPADA PIHAK TERKAIT TIDAK DI HIRAUKAN

Protes ini tidak pernah dilakukan secara kasar apalagi frontal yang sifatnya membangkang bahkan Masyarakat sudah berulang kali berusaha menanyakan kepada pihak yang dianggap terkait akan tetapi tidak dihiraukan. Puncaknya karena kebuntuan itulah maka Masyarakat Kelompok Tani ini berusaha mencari keadilan dengan menghubungi berbagai pihak dan akhirnya ketemu dengan JPKP sebagai relawan JOKOWI yang memang selama lebih dari 10 tahun ini terus mengawal program strategis JOKOWI diseluruh Indonesia termasuk membantu Masyarakat dan Pemerintah mengurai berbagai kebuntuan. Setelah melalui telaah secara cermat dan penuh kehati-hatian, kemudian KETUA UMUM JPKP bersurat resmi ke PJ Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara sejak November 2023 namun hingga hari Penangkapan Masyarakat bahkan sampai hari ini PJ Bupatipun tidak pernah menanggapi surat tersebut.

4. MASYARAKAT DIANGGAP MENGHALANG-HALANGI PEMBANGUNAN BANDARA VVIP IKN

Karena tidak dihiraukan oleh PJ Bupati padahal hasrat Masyarakat sangat mendukung percepatan Pembangunan Bandara VVIP ini tentu dengan tetap memperhatikan hak dasar mereka maka setiap rencana kegiatan dilapangan yang akan dilakukan oleh Kontraktor selalu diperingatkan agar memperhatikan terlebih dahulu hak-hak dasar mereka khususnya nama-nama mereka yang dihilangkan termasuk Tanam Tumbuh karena kalau sudah digusur maka sama saja menghilangkan bukti pernah adanya eksistensi mereka disana. Atas tindakan ini maka Masyarakat dianggap menghalang-halangi Pembangunan Bandara VVIP IKN.

5. PENJADWALAN VERIFIKASI TANAM TUMBUH DENGAN TIM TERPADU

Pada dasarnya beberapa hari sebelum terjadinya penangkapan meskipun harus berjuang Panjang guna meraih hak dasar mereka pada saat itu sudah terjadi kesepakatan dari semua pihak termasuk Tim terpadu untuk melakukan verifikasi tanam tumbuh dan identifikasi lahan sehingga ditentukanlah jadwal untuk segera menjalur. Pada hari yang sudah ditentukan untuk menjalur dan identifikasi serta verifikasi Tanam Tumbuh ternyata Petugas Verifikasi dari Tim Terpadu berhalangan karena masih ada kegiatan di lahan lain sehingga diputuskanlah agar Verifikasi Tanam Tumbuh dilakukan esok hari, semua sudah menyepakati jadwal tersebut.

Namun aneh bin ajaib, pagi hari disepakati akan dilakukan verifikasi dan identifikasi Tanam Tumbuh namun dengan tiba-tiba lahan Masyarakat sudah digusur dan dihadiri oleh Kapolsek Penajam, tentu kejadian ini sangat mengagetkan Masyarakat dan berusaha menghalangi seraya menjelaskan bahwa jangan dulu digusur karena baru mau dilakukan verifikasi tanam tumbuh, lewat diskusi yang alot itu lalu kemudian Kontraktor menghentikan kegiatannya berikut menarik Kembali semua alat berat yang digunakan, Masyarakatpun kembali ke rumah dan berkumpul untuk acara makan malam sambil bakar-bakar ikan guna mempersiapkan diri untuk agenda esok hari bersama Tim Terpadu melakukan Verifikasi Tanam Tumbuh.

6. PENANGKAPAN YANG TIBA-TIBA

Namun belum juga matang hasil bakar-bakaran ikan mereka dengan tiba-tiba didatangi orang yang mengaku Polisi beberapa kendaraan yang didahului kehadiran Kapolsek dan langsung menangkap mereka entah dibawa kemana, kebelakangan baru diketahui ternyata dibawa ke Menara Pandang dan seterusnya ke POLDA KALTIM di Balikpapan. Oleh Polisi kemudian alasan penangkapan itu dilakukan karena Masyarakat ini disangkakan melanggar UU Darurat Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin, sungguh aneh bin ajaib karena memang Masyarakat Petani ini sehari-harinya bawa Parang dan Mandau sebagai alat kerja mereka apalagi mau melakukan Verifikasi Tanam Tumbuh dan melintasi pepohonan dan semak belukar, Padahal parang dan Mandau itu adalah alatnya.

7. TIDAK ADA NIATAN MENGANCAM

Tidak pernah ada sedikitpun Masyarakat mau menggunakan Parang dan Mandau itu digunakan untuk menyembelih Kapolsek, menyembelih Bupati, menyembelih Polisi dan aparat lain, menyembelih Tim Terpadu maupun menyembelih Kontraktor, Parang dan Mandau itu murni digunakan untuk Bertani termasuk hari itu untuk membuka jalur untuk jalan bagi kemudahan team nantinya pada saat verifikasi Tanam Tumbuh.

Berikut kronologis lengkapnya:

1. Pada hari Jumat tanggal 23 February 2024, kami sudah janji dengan Pak Angga dari team terpadu proyek Pembangunan VVIP Bandara IKN untuk melanjutkan verifikasi tanam tumbuh di lahan kami yang belum terverifikasi karena sempat tertunda beberapa waktu akibat masih padatnya agenda Tim Verifikasi ditempat lain. Tim Terpadu menyampaikan bahwa lahan yang mendapatkan giliran verifikasi Tanam Tumbuh hari itu adalah milik Pak Ramli (Lampiran 1 – Photo).

2. Pada hari Sabtu tanggal 24 February 2024 sekitar pukul 07.30 wita, kami Kelompok Tani Saloloang yang dipimpin oleh Ketua Kelompok (Anton Lewi) beserta 8 anggota lainnya berangkat dari Donghwa menuju kebun / lahan milik Pak Ramli yg rencananya mendapatkan giliran akan diverifikasi Tanam Tumbuhnya mengikuti jadwal Tim Terpadu tersebut. Pukul 09.00 kami sudah janji ketemu di salah satu pondok kami dekat lokasi lahan Pak Ramli, namun hingga Pukul 10.00 Pak Angga dan teamnya belum juga datang, akhirnya saya bersama 8 orang anggota bergeser dari Pondok Kebun menuju lokasi Pak Ramli, pada saat kami tiba di lokasi,

ternyata sudah ada alat berat yang beraktivitas mendorong/menggusur lahan milik Pak Ramli. Pada saat itu juga kami mendatangi Pengawas (Mandor) dan meminta agar tidak melakukan penggusuran/pendorongan karna lahan tersebut belum diverifikasi alias belum dihitung jumlah tanam tumbuhnya. Dalam pembicaraan kami dengan Pengawas project, Mandor tersebut sempat bertanya kepada saya apakah kami boleh melanjutkan pekerjaan yang di luar lokasi Pak Ramli, lalu saya menjawab silahkan karena itu bukan milik anggota kami, silahkan kordinasi dengan pemiliknya – aktivitas di lahan Pak Ramli sudah tidak ada lagi pada saat itu, lalu kemudian kami berpisah dengan Pengawas, kami Kembali menuju ke Pondok untuk berteduh.

Sementara kami minum dan merokok di Pondok, tiba-tiba datang rombongan aparat keamanan yang saya tidak tau berapa jumlahnya yang dipimpin oleh KAPOLSEK Penajam bersama Polisi dan TNI berikut SATPOL PP dan Camat Penajam (Lampiran 2 – Video) .

Pada saat itu saya sampaikan dan bermohon kepada rombongan tersebut yang dipimpin Kapolsek Penajam meminta tolong lahan ini jangan digusur/didorong dulu karna belum dilakukan verifikasi Tanam Tumbuh yang seharusnya dijadwalkan hari ini tetapi karena Tim Verifikasi belum datang jadi harap ditunda dulu, bagi yang terlanjur didorong biarkan saja nanti kita minta diverifikasi saja dengan tafsiran yang baik.

Permohonan kami ini ditolak oleh KAPOLSEK (P HARAHAP) dan tetap minta agar mereka bisa melanjutkan pendorongan di lahan tersebut. **Tapi lagi-lagi karena alasan lahan tersebut belum di verifikasi Tanam Tumbuhnya, maka kami bertahan dan meminta agar jangan dulu dilanjutkan sebelum selesai di verifikasi dan akhirnya pekerjaan penggusuran tidak dilanjutkan, setelah itu kami langsung kembali ke Pondok kebun untuk beristirahat.**

Pada saat kami tiba di Pondok, disana kami sudah berjanji untuk bertemu dengan team JPKP dari Balikpapan, berselang beberapa menit kemudian sekitar pukul 11.30 Pak Angga dari team verifikasi datang dan kami minta agar segera dilanjutkan verifikasi di lahan Pak Ramli, namun Pak Angga minta izin untuk kordinasi dulu dengan team Pertanian, namun sampai pukul 11.15 Pak Angga tidak ada kabar lanjutan.

Sekitar Pukul 12.08 wita, Bapak Imam Cahyono (Jaksa) dari KEJARI PPU, bersama LURAH PANTAI LANGO datang ke lokasi dan berbincang-bincang dengan kami di dampingi oleh Team Pengacara dari JPKP, dalam perbincangan tersebut terjadi kesepakatan untuk segera melanjutkan perhitungan dan verifikasi tanam tumbuh yang akan dilanjutkan keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 25 February 2024. Setelah Pak JAKSA & PAK LURAH pulang, beberapa menit kemudian datang lagi rombongan

INTEL dari Polsek PPU di bawah Pimpinan Pak DAMANIK, sama seperti dalam perbincangan sebelumnya dengan P JAKSA & P LURAH kami sepakati untuk melanjutkan verifikasi dan perhitungan tanam tumbuh besok hari Minggu tanggal 25 February 2024.

Dalam perbincangan tersebut juga kami menjelaskan semua kronologi tentang Sejarah kepemilikan lahan kami dan asal muasal perolehan lahan.

Pada pukul 17.30 wita, kami bersama seluruh anggota dan rombongan Team JPKP kembali menuju ke rumah di Donghwa, karna team dari JPKP rencana menginap sambil mempersiapkan kordinasi dengan Anggota Kelompok Tani dengan Team Terpadu terkait rencana kelanjutan verifikasi Tanam Tumbuh dan lahan milik Kelompok Tani Saloloang agar disegerakan sesuai jadwal. Pada pukul 19.00 wita saya (Anton Lewi) bersama saudara PITER, DAUD, RAMLI, HAMKAH, DANDANG, ROMI & TOMY sedang mempersiapkan api untuk bakar ikan dan ayam.

Pukul 19.30 wita, tiba-tiba KAPOLSEK PANAJAM lewat di depan Toko Haji ASNAWI tempat bakar ikan & ayam, bahkan kami sempat menegur beliau mau kemana tetapi tidak di jawab hanya melambaikan tangan, tidak lama kemudian setelah KAPOLSEK lewat tiba-tiba datang beberapa mobil yang memuat orang-orang yg tidak kami kenal, lalu kemudian mereka turun dari mobil langsung menghampiri saya dan langsung memegang tangan saya 3 orang dua dari samping kiri kanan, satu dari belakang memeriksa badan, setelah itu saya langsung di bawah ke mobil selanjutnya di bawah ke Menara Pandang (ini adalah kantor Kontraktor Pemborong pekerjaan Proyek VVIP Bandara IKN), bersamaan dengan penangkapan itu juga melakukan penangkapan yang lain, bahkan mereka sempat mau menangkap/mengambil Bapak Haji ASNAWI juga karna dikira beliau adalah salah satu dari Anggota Kelompok Tani yg ikut ke Lokasi. Berselang kira-kira satu jam kemudian teman-teman yang lain juga ternyata ikut ditangkap dan di bawah ke Menara Pandang di Kantor Pemborong Proyek, kami bukan dibawa ke Kantor Polisi.

Perlu kami sampaikan bahwa dalam pemberitaan yang beredar di Media Massa maupun Media Elektronik, kami yang ditangkap dianggap melakukan pengancaman dan menghalangi Pembangunan Proyek Bandara VVIP IKN dengan menggunakan senjata tajam, pernyataan itu sama sekali tidak benar.

Yang benar adalah lahan kami digusur padahal belum dilakukan verifikasi dan identifikasi Tanam Tumbuh yang seyogianya dilakukan esok hari, jadi kalimat mengancam dan menghalangi proyek sangatlah tidak benar dan yang ada adalah mereka terlebih dahulu menggusur lahan milik kami lalu kami halangi agar dilakukan terlebih dahulu verifikasi dan identifikasi Tanam Tumbuh. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah Kontraktor itu sudah lebih duluan berada di lokasi lahan kami lalu menggusur dengan alat berat, mereka memasuki lahan kami tanpa izin dan merusak Tanaman kami yang didampingi oleh Kapolsek Penajam.

Peristiwa yg sesungguhnya bahwa kami hanya meminta mereka menghentikan pekerjaan tersebut sebelum selesai di verifikasi tanam tumbuh. Dalam penangkapan tersebut juga kami tidak di beritahukan atau di perlihatkan Surat Perintah Penangkapan oleh petugas yang menangkap kami

pada saat itu, fakta yang terjadi adalah kami di jemput paksa sama dengan TERORIS, lalu di bawah ke Menara Pandang milik Kontraktor Pemborong Bandara VVIP IKN selanjutnya malam itu kami di bawah ke Polda KALTIM

Pada sekitar pukul 02.15 wita, kami tiba di Polda Kaltim, setiba di ruang pemeriksaan JATANRAS ternyata disana sudah ada team Kuasa Hukum yang menunggu, namun itupun hanya Pak Hermon yang boleh melihat kami, sementara teman-teman yang lain dari JPKP diminta agar tidak mendekat ke ruang JATANRAS.

Keesokan harinya saya tidak tau persis jam berapa, kami di bawah ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk periksa kesehatan, karna ternyata dari hasil pemeriksaan marathon sepanjang malam Pihak Kepolisian telah menetapkan kami sebagai tersangka dengan sangkaan telah melanggar UU Darurat membawa senjata tajam tanpa izin.

Perlu Kami tegas kan bahwa kami tidak ada niat sedikitpun untuk mengancam, mengintimidasi pekerja apalagi dengan menggunakan senjata tajam seperti yg di tuduhkan kepada kami, adapun terkait Vidio tersebut (Lampiran-2), merupakan percakapan saat kami meminta penghentian aktivitas karena belum dilakukan inventarisasi tanam tumbuh, dan tidak ada bukti dalam percakapan itu bahwa kami menyuruh pekerja berhenti / membawa alat mereka keluar dari lokasi kami dengan kekerasan apalagi mengancam dengan menggunakan senjata tajam seperti yang awal telah kami jelaskan di atas, bahwa kami membawa Parang dan Mandau, untuk membuka akses penjaluran semak belukar untuk dilalui, karena kami sudah dijadwal oleh Tim Terpadu untuk melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Tanam Tumbuh pada esok harinya.

Hal yang paling penting yang harus kita ketahui bersama bahwa bagi kami Petani, Parang / Mandau adalah bagian pokok dari alat kerja petani dan itu sudah dilakukan turun temurun dari nenek moyang kami.

Mungkin Bapak-Bapak Polisi bukan anak atau keluarga Petani, mungkin juga Bapak PJ BUPATI bukan anak dan keluarga Petani sehingga kalau masuk hutan / kebun harus bawah laptop. Sungguh aneh bin ajaib, karna beberapa hari sebelumnya terjadi demo tapal batas antara Kelurahan Gresik & Jenebora yang nyata-nyata menghentikan kegiatan Pekerja dan membawah senjata tajam, berteriak memaki-maki menggunakan kata kasar tapi tidak di tangkap, sedangkan kami yang selama ini sangat santun dan menghormati semua pihak termasuk yang mulia PJ Bupati malah ditangkap (Lampiran-3 Video).

Justru sangat ironis kami yg sedang berada di kebun untuk menjalin agar memudahkan team verifikasi melintasi akses demi percepatan kok malah di tangkap?,

Kami diperlakukan tidak ada bedanya dengan gembong Narkoba dan Teroris, ada apa dengan Aparat Keamanan dan PJ Bupati?, Ada apa dengan Team Gugus Tugas?.

Kami membawa Parang dan Mandau bukan untuk berperang apalagi melukai orang lain, kami membawa alat tersebut sama dengan para pejabat bawa Laptop, Pulpen dan Kertas untuk bekerja.

Yang perlu kami sampaikan juga, sekaligus sebagai klarifikasi terkait pernyataan Bapak PJ. BUPATI bahwa :

- a. Kelompok Tani Saloloang tidak pernah setuju dengan keinginan Bapak PJ Bupati untuk menerima relokasi yang hanya berpedoman dengan **PerPres No 62 Tahun 2018 dan PerPres No. 78 Tahun 2023** karena lahan kami bukan Tanah Terlantar, lahan kami tidak pernah dikelola oleh PT. TKA Pemilik ex.HGU yang diberikan ke Bank Tanah akan tetapi kami pemilik lahan turun temurun puluhan tahun sebelum ada TKA, sebelum ada HGU sehingga pendekatan payung hukumnya berdasarkan Undang-Undang Reforma Agraria yang tepat adalah **PerPres No. 86 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum;**
 - b. Kelompok Tani Saloloang memiliki bukti kepemilikan / alas hak yg jauh lebih duluan dari pada HGU seperti yang Bapak PJ Bupati pertahankan dan pegang teguh.
 - c. Lahan Kelompok Tani Saloloang tidak masuk di HGU PT. TKA seperti yang Bapak PJ Bupati selalu sampaikan kemana-mana termasuk di Media Massa & Elektronik.
 - d. Terdapat Surat Perjanjian Damai antara Kelompok Tani Saloloang dengan PT. TKA tahun 1998 di Grogot yang di tanda tangani bersama termasuk didalamnya Pejabat Pertanahan, Management PT. TKA, DANDIM, KAPOLRES & KETUA DPR di Grogot.
 - e. Terdapat bukti ganti rugi tanam tumbuh milik Kelompok Tani yang digusur oleh PT. TKA di tahun 1997.
 - f. JPKP bersama Bapak KETUA UMUM (MARET SAMUEL SUEKEN) adalah bagian dari yang mendorong percepatan pembangunan IKN.
 - g. Disetiap pertemuan kami / Kelompok Tani Saloloang selalu menyuarakan untuk mendukung 100% pembangunan IKN
3. Dan ada hal yang sangat mendasar yang membuat Kelompok Tani Saloloang begitu gigih berjuang, yang mungkin Bapak PJ BUPATI & TEAM TETPADU lupa atau memang tidak tau terkait PERMASALAHAN YANG SESUNGGUHNYA YAITU:
- a. Adanya nama-nama fiktif yg muncul di atas Peta Bidang lahan milik Kelompok Tani Saloloang sedangkan nama Petani sendiri dihilangkan
 - b. Dari awal bergulirnya isu pembangunan Bandara VVIP IKN, Kelompok Tani Saloloang tidak pernah diundang dalam sosialisasi tersebut kecuali yang terakhir kali dikumpulkan oleh Bupati ratusan orang semua korban terdampak dan disana kami sempat menyuarakan apa yang kami alami tetapi tidak juga dihiraukan (Lampiran-3 Video).
 - c. Setelah kami mengadu ke Ketua Umum JPKP barulah mulai kami diberitahu kalau ada sosialisasi
 - d. Nama-nama fiktif yg di plot di atas lahan kami ada sebagian yang sudah membuat pernyataan kalau mereka sendiri tidak pernah merasa memiliki, membeli atau berkebun di lahan tersebut, bahkan mereka tidak tau dimana tempat akan di bangun BANDARA VVIP yang di maksud (Lampiran-4 Video).
 - e. Dalam Peta Bidang yang beredar terdapat nama-nama oknum Pegawai Kelurahan (Dalle Roy Bastian) diatas lahan milik kami, dan dapat kami pastikan bahwa orang ini tidak pernah

- berkebun apalagi memiliki lahan di area Kelompok Tani Saloloang akan tetapi PJ Bupati berpegang teguh berdasarkan data tersebut
- f. Tanah / lahan / kebun milik Kelompok Tani Saloloang tidak masuk di HGU PP T. TKA oleh sebab itu kami minta agar tidak diperlakukan sama dengan lahan ex HGU inilah yang seakan-akan sengaja digiring untuk menghilangkan fakta yang sebenarnya tentang hak kepemilikan Kelompok Tani Saloloang.
 - g. BPN PPU dan Bank Tanah tidak pernah turun langsung ke Masyarakat Kelompok Tani Saloloang dalam hal pendataan dan inventarisasi lahan milik kami, Bank Tanah hanya bekerja sama dengan oknum Pegawai Kelurahan (Kasi PPSDA) Kelurahan Pantai Lango sehingga data mereka gunakan hanya dari salah sumber .
 - h. Kami sebagai Warga Negara yang taat hukum dan peduli terhadap bangsa ini, tidak ingin Pemerintah memberikan / membayar sesuatu kepada orang yang salah, membayar kepada nama-nama fiktif yang adalah orang yang sebenarnya tidak punya hak. Kekeliruan ini justru kami berusaha menjaga agar Aparat Negara tidak terperangkap dan melanggar hukum memperkaya orang lain menggunakan uang Negara untuk kepentingannya
4. Bahwa semua berawal dari dugaan adanya keterlibatan Mafia Tanah yang ingin memanfaatkan situasi dan peluang atas program Pemerintah tentang pembangunan bandara VVIP IKN dengan memasukkan nama-nama fiktif yang sekaligus menghilangkan nama-nama Kelompok Tani yang sesungguhnya (Lampiran-5 Gambar Peta Bidang versi abal-abal yang diakomodir PJ Bupati);
 5. Perlu juga diketahui bahwa pada bulan Oktober kami sudah bersurat ke BANK TANAH, PUPR, kemudian pada bulan November Kami bersurat kepada PJ GUBERNUR KALTIM, PJ BUPATI PPU namun Bapak PJ BUPATI tidak menghiraukan surat kami tersebut bahkan selalu menyatakan bahwa kami tidak punya surat / alas hak, artinya Bapak PJ. BUPATI tidak pernah membaca surat kami alias sengaja mengabaikannya.
 6. Terkait penangkapan terhadap 9 orang bagian dari Kelompok Tani Saloloang, sampai hari ini masih membuat trauma dan tidak habis pikir, apa yang sebenarnya mereka inginkan, bahkan sampai saat ini rumah warga hampir setiap hari didatangi oleh orang yang tidak dikenal, mereka mengaku Tentara, ada yang mengaku Bank Tanah yang tujuannya juga kami tidak tau, hal tersebut membuat keluarga Petani resah dan ketakutan, yang makin membuat bingung adalah mereka ini suruhan siapa dan tujuan apa, ini dapat kami buktikan dengan photo-photo para Oknum yang datang ke rumah warga (Lampiran-6 Photo)
 7. Pada tanggal 24 Februari 2024, Ketua Umum JPKP langsung mendatangi Penyidik JATANRAS POLDA KALTIM serta membuat Surat Permohonan Penangguhan Penahanan dan diterima oleh KANIT JATANRAS, namun karena ada koreksi redaksi surat maka harus diperbaiki terlebih dahulu. Pada hari yang sama KETUA UMUM didampingi oleh Tim juga mendatangi Rumah Tahanan namun tidak diperkenankan menemui warga yang ditahan dengan alasan bukan hari dan jam besuk, sempat terjadi perdebatan namun akhirnya KETUA UMUM tidak memaksakan diri berdebat dan harapan menemui korban penangkapan gagal.

8. Pada tanggal 25 Februari 2024, Surat Permohonan Penangguhan Penahanan yang sudah dikoreksi diterima oleh TU KAPOLDA dan diantarkan langsung oleh Kuasa Hukum JPKP Bpk. Hermon Yari Kadama (Lampiran-7 dokumen Permohonan Penangguhan), pada hari yang sama KETUA UMUM JPKP Berkoordinasi langsung dengan DIRKRIMUM dan KAPOLDA via WA namun tidak mendapatkan tanggapan. Koordinasi ini terus dicoba setiap hari namun gagal alias tidak ada tanggapan dan sampai akhirnya KETUA UMUM memutuskan untuk Berkoordinasi ke Pusat melalui Istana. Dari pejabat di Istana menyampaikan bahwa Presiden akan berkunjung ke KALTIM; Samarinda, Bontang, IKN dan Balikpapan sehingga kalau ada masalah bisa langsung disampaikan ke Presiden. KETUA UMUM JPKP pun meminta jadwal untuk bertemu dengan Presiden serta mengatur siapa saja yang akan hadir mendampingi termasuk keluarga dan isteri-isteri korban yang sementara ditahan. Diputuskan ada 5 orang yang akan hadir bertemu dengan Presiden mendampingi KETUA UMUM dan tanggal menunggu jadwal dan tempat pertemuan.
9. ASESPRIPRES menyampaikan bahwa pertemuan akan dilakukan di Bandara Sepinggang Kota Balikpapan Pada tanggal 2 Maret 2024, Pukul 14.00 WITA dengan terlebih dahulu memasukkan nama-nama dan identitas masing-masing yang akan hadir
10. Pada tanggal 2 Maret 2024, di ruang tunggu VVIP Bandara Sepinggang Balikpapan ternyata ada KAPOLDA dan PANGDAM. Terjadi percakapan dan sekaligus menyampaikan rencana mempertemukan isteri-isteri Kelompok Tani Saloloang yang ditangkap dan dipenjara itu bertemu dengan Presiden dan menyampaikan permasalahannya namun Kapolda menyampaikan bahwa tidak usah memberikan beban baru ke Presiden dan cukup diselesaikan di daerah saja. Kan saya ada kata Kapolda, jadi cukup saya saja yang selesaikan sekarang juga, atas pernyataan Kapolda tersebut saya berterima kasih dan menyampaikan bahwa kalau Demikian saya tidak perlu lagi menyampaikan permasalahan ini ke Presiden (Lampiran-8 Photo Isteri-isteri Petani dengan Kapolda);
11. Selanjutnya diwaktu yang sama, saya sampaikan ke KAPOLDA bahwa karena sudah terlanjur dapat jadwal pertemuan dengan Presiden maka isteri-isteri Kelompok Tani Saloloang yang ditangkap dan dipenjara itu meskipun tidak perlu lagi menyampaikan permasalahan ke Presiden tetapi tetap ikut hanya untuk sekedar photo dengan Presiden (Lampiran-9 Photo dengan Presiden)
12. Beberapa waktu kemudian pasca kepulangan Presiden, KETUA UMUM JPKP mendapatkan pesan WA dari KAPOLDA bahwa urusannya sudah langsung diurus dan ditangani KAPOLDA, sayapun mendapatkan telpon dari keluarga korban bahwa mereka sudah menunggu di Menara Pandang menjemput paketan yang ternyata itu adalah suami-suami alias keluarga mereka yang sudah dibebaskan (Lampiran-10 Photo Pembebasan di Menara Pandang)

Lampiran Foto :

1. Tim Terpadu menyampaikan bahwa lahan yang mendapatkan giliran verifikasi Tanam Tumbuh hari itu adalah milik Pak Ramli (Lampiran 1 – Photo).
2. menggunakan senjata tajam seperti yg di tuduhkan kepada kami, adapun terkait Vidio tersebut (Lampiran-2
3. kami sempat menyuarakan apa yang kami alami tetapi tidak juga dihiraukan (Lampiran-3 Video)
4. (Lampiran-4 Video)
5. Lampiran-5 Gambar Peta Bidang versi abal-abal yang diakomodir PJ Bupati
6. photo-photo para Oknum yang datang ke rumah warga (Lampiran-6 Photo)
7. Lampiran-7 dokumen Permohonan Penangguhan
8. Lampiran-8 Photo Isteri-isteri Petani dengan Kapolda
9. Lampiran-9 Photo dengan Presiden
10. Lampiran-10 Photo Pembebasan di Menara Pandang